

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan teori menurut George C. Edward III mengenai Penerapan *e-government* pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang (studi kasus pelayanan perizinan usaha perdagangan), dapat disimpulkan bahwa dapat dilihat dari empat dimensi yaitu sebagai berikut:

1. Komunikasi

Dalam dimensi ini, penerapan *e-government* pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang terkait pelayanan perizinan usaha perdagangan belum optimal menjalankannya. Hal ini terjadi karena komunikasi yang diberikan pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang kepada masyarakat belum jelas. Sehingga masih banyak masyarakat yang mengalami hambatan.

2. Sumberdaya

Dalam dimensi ini, penerapan *e-government* pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang terkait pelayanan perizinan usaha perdagangan belum optimal menjalankannya. Hal ini terjadi karena kualitas sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang belum cukup baik. Masih banyak pegawai yang belum memiliki kesiapan dalam memberikan pelayanan.

3. Disposisi

Dalam dimensi ini, penerapan e-government pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang terkait pelayanan perizinan usaha perdagangan sudah cukup baik.

4. Struktur Birokrasi

Dalam dimensi ini, penerapan e-government pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang terkait pelayanan perizinan usaha perdagangan belum optimal. Hal ini dikarenakan SOP yang diberikan belum optimal karena masih banyak masyarakat yang mengalami hambatan Ketika melakukan upload berkas dari alur pendaftaran surat izin usaha perdagangan.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis mengenai Penerapan e-government pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Studi Kasus Pelayanan Perizinan Usaha Perdagangan), yaitu:

1. Saran Praktis

Disarankan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk lebih meningkatkan kualitas SDM agar para pelaku usaha yang mengalami hambatan dalam proses perizinan usaha perdagangan dapat terbantu dengan baik.

2. Saran Teoritis

Peneliti menyarankan untuk para peneliti selanjutnya mengenai penerapan e-government pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Studi Kasus pelayanan perizinan usaha perdagangan) gunakan teori lain untuk menggali lebih dalam dari sudut pandang teori lain.

